

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 *Signaling Theory*

Teori sinyal dikemukakan pertama kali oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). Purba, (2023) menjelaskan definisi teori sinyal sebagai teori yang “menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor)”.

Menurut Ghozali (2020) dalam Safitri dan Yuliana (2021), mendefinisikan teori sinyal sebagai berikut:

“secara umum sinyal adalah isyarat didalam perusahaan yang dilakukan manajer kepada investor. Informasi yang berkaitan dengan kondisi dan prospek perusahaan untuk masa yang akan datang tentu lebih banyak dimiliki oleh perusahaan. informasi yang dimiliki lebih berkualitas dibandingkan informasi yang dimiliki investor”.

Ghozali (2020) dalam Sanjaya dan Ekadjaja (2025), menjelaskan bahwa asimetri informasi perusahaan diperlukan perusahaan untuk:

“Dalam perusahaan, pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih terkait dengan masalah, kesempatan, kekuatan, dan kelemahan perusahaan pada saat itu jika dibanding dengan investor. Dari asimetri informasi ini, pihak manajemen perlu memberikan sinyal kepada pihak investor. Sinyal yang dipilih untuk dikirim harus memuat informasi yang dapat memicu perubahan kepada persepsi publik”.

Menurut Ross (1977) dalam Rahim et al. (2023), *signalling theory* menjelaskan:

“Mengenai dorongan atau alasan suatu perusahaan memberikan informasi tertentu kepada pihak luar. Teori tersebut dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa pihak manajemen atau internal perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki pihak luar. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan akan berusaha

menggunakan informasi yang mereka miliki untuk memberikan pesan kepada pihak luar mengenai kinerja yang mereka capai. Pesan tersebut akan direspon sebagai sinyal baik atau sinyal buruk oleh pihak luar, sehingga sinyal tersebut dapat direspon pasar dalam menilai kualitas perusahaan serta dapat membantu perusahaan mengambil kebijakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan”.

Menurut Chen dan Rasyid (2025), menjelaskan hubungan *financial distress* dengan teori sinyal sebagai berikut:

“Teori sinyal juga dapat dijelaskan melalui tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam memberikan instruksi kepada investor terkait bagaimana penilaiannya terhadap prospek perusahaan. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, laporan keuangan juga dapat menginformasikan penurunan kondisi keuangan atau kerugian yang terjadi pada perusahaan sehingga manajer dapat mengambil tindakan sebelum terjadinya likuidasi serta memberi sinyal pada pihak eksternal tentang kemungkinan kondisi perusahaan dalam beberapa waktu ke depan”.

Menurut Platt & Platt (2002) dalam Aziza dan Respati (2026), menjelaskan hubungan *financial distress* dengan teori sinyal sebagai berikut:

“*Financial distress* merupakan sinyal bahaya bagi perusahaan yang menandakan bahwa perusahaan sedang mengalami krisis finansial dan berpotensi mengalami kegagalan. Pada dasarnya investor dapat membaca sinyal-sinyal kebangkrutan suatu perusahaan dengan melihat kinerja dalam laporan keuangan perusahaan dan situasi pasar. Informasi dalam laporan keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan situasi pasar seperti nilai tukar dan laju inflasi dapat menjadi sinyal bagi investor untuk memprediksi terjadinya *financial distress* dalam suatu perusahaan”.

Menurut Kwok dan Bangun (2023), hubungan teori sinyal dengan *financial distress* yaitu “dalam teori sinyal, perusahaan yang terus berutang akan sulit melunasi utang saat utang lebih besar dari aset perusahaan sehingga berpotensi mengalami *financial distress*. Selain itu, Scott (2014) dalam Stephen dan Bangun (2023) juga menjelaskan bahwa:

“Teori sinyal memberikan informasi kepada pihak eksternal tentang kondisi masa depan perusahaan. Informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa kabar baik seperti kondisi perusahaan baik, pengumuman laba rugi, pembagian dividen dan informasi berita buruk dapat berupa kerugian perusahaan sehingga tidak dapat membagi dividen, atau terlalu banyak hutang perusahaan sehingga bertambah risiko kebangkrutan”.

## 2.2 *Agency Theory*

Definisi teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Handoko & Handoyo (2021), yaitu:

“*Agency theory* merupakan suatu hubungan kontrak antara *shareholder* sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen perusahaan. Agen diminta bekerja menggantikan *shareholder* dalam kontrol perusahaan, sebab agen yang ditunjuk untuk mengelola perusahaan merupakan para profesional dan ahli yang dapat meningkatkan kekayaan *shareholder*”.

Definisi teori keagenan menurut Eisenhardt (1989) dalam Setyawan & Aryati (2023), teori keagenan menjelaskan bahwa:

“ketika pemegang saham mempekerjakan dan mendelegasikan wewenang kepada manajemen, muncul hubungan keagenan di antara keduanya. Sebagai agen, manajemen memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya dan memiliki wewenang atas pemegang saham sebagai prinsipal. Namun, hubungan ini seringkali tegang karena adanya konflik kepentingan antara keduanya disebut sebagai konflik keagenan. Konflik keagenan muncul sebagai akibat dari dua masalah: prinsip sulit untuk menilai apakah agen telah berperilaku dengan benar, dan prinsipal dan agen memiliki agenda yang berlawanan”.

Eisenhardt (1989) dalam Handoko & Handoyo (2021), tiga asumsi teori keagenan yaitu:

“asumsi sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menjelaskan manusia memiliki sifat *self-interest*, *bounded rationality*, dan *risk averse*. Asumsi keorganisasian menjelaskan dalam perusahaan akan ada konflik kepentingan dan menimbulkan *asymmetric information*. Sedangkan asumsi informasi menjelaskan bahwa informasi dipandang sebagai komoditas yang berharga dan dapat diperjualbelikan”.

Menurut Hanifah dan Purwanto (2013) dalam Christy & Natalylova (2023) penyebab terjadinya masalah agensi, yaitu:

“Salah satu penyebab terjadinya masalah agensi adalah *asymmetric Information*. Terdapat dua permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Moral hazard* adalah permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama *principals* dalam kontrak kerja, sedangkan *adverse selection* adalah suatu keadaan saat *principals* tidak dapat mengetahui kebenaran informasi suatu keputusan yang diambil oleh *agent*”.

Dalam perspektif keagenan, cara mengatasi masalah agensi menurut Salim & Yanti (2023) adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan perspektif teori keagenan, salah satu cara untuk mengurangi konflik tersebut adalah dengan memberikan informasi yang tepat kepada semua pihak dalam pengambilan keputusan. Informasi yang tepat dapat menjadi gambaran perkembangan perusahaan. Sebagai agen, manajer harus menyajikan informasi yang benar agar dapat mengurangi kesulitan keuangan. Hal ini juga berguna agar semua pihak yang terkait dengan perusahaan, baik pemilik atau pemegang saham sebagai *principal* maupun manajer sebagai agen dapat mendeteksi adanya indikasi kebangkrutan dengan memberikan informasi terkait keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dengan demikian, biaya keagenan dapat dikurangi dan diharapkan kinerja bisnis akan membaik”.

Menurut Sholikha et al., (2022) hubungan teori agensi dengan *financial distress*, yaitu:

“Hubungan teori agensi dengan *financial distress* yaitu para pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principle*) menyerahkan wewenang kepada pihak manajemen (*agent*) untuk mengatur aktivitas perusahaan agar mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika pihak manajemen melakukan tindakan demi kepentingan pribadi yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yakni merugikan pihak I akan menyebabkan para pemegang saham tidak percaya lagi dan mengambil kembali sahamnya pada perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan bahkan pailit.”

Menurut Alexandra et al. (2022), hubungan terosi agensi dalam *good corporate governance* dengan potensi *financial distress*, disebabkan oleh:

“Tata kelola perusahaan yang kuat menjaga kepercayaan investor, sebagai akibatnya, perusahaan dapat meningkatkan modal secara efisien dan efektif. Masalah yang muncul dari pemisahan kepemilikan dan kontrol selain konflik agensi adalah asimetri informasi. Dalam keadaan ini, di satu pihak (direksi) memiliki keuntungan atas yang lain (pemegang saham), karena pihak direksi memiliki lebih banyak informasi pribadi yang dapat mereka gunakan untuk menguntungkan kepentingan mereka”.

Manan & Hasnawati (2022) menjelaskan keterkaitan teori agensi dengan *good corporate governance* dalam mengatasi konflik perusahaan yang memicu *financial distress* sebagai berikut:

“Menurut teori *agency* pertentangan manajemen suatu perusahaan dengan *shareholders*-nya bisa menyebabkan timbulnya *agency cost* atau biaya yang

dikeluarkan sebagai upaya dalam mempertahankan hubungan manajemen perusahaan dengan *shareholders*. Sebagai upaya untuk menghindari hal ini diperlukan *good corporate governance* yang baik guna mensejahterakan kepentingan semua pihak baik manajemen perusahaan maupun *shareholders* sehingga terciptanya lingkungan kerja yang baik dan meminimalkan terjadinya konflik pada perusahaan”

### 2.3 Analisis Laporan Keuangan

Berdasarkan IAI (2026) dalam PSAK 201, laporan keuangan yaitu:

“Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- (a) “aset;”
- (b) “liabilitas;”
- (c) “ekuitas;”
- (d) “penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;”
- (e) “kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan”
- (f) “arus kas.”

Laporan keuangan yang lengkap berdasarkan IAI (2026) dalam PSAK 201, terdiri dari:

- 1) “laporan posisi keuangan pada akhir periode;”
- 2) “laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;”
- 3) “laporan perubahan ekuitas selama periode;”
- 4) “laporan arus kas selama periode;”
- 5) “catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;”

- 6) “informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraph 38 dan 38A; dan”
- 7) “laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

Menurut Horne (2017) dalam Dewi et al. (2022), analisis laporan keuangan merupakan “seni mengubah data dari laporan keuangan ke informasi, dengan manfaat untuk mengambil keputusan”. Selain itu, juga menjelaskan terkait definisi laporan keuangan adalah “proses evaluasi dan interpretasi informasi keuangan suatu perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan tersebut” (Harmadji et al., 2024).

Menurut Prasetyo et al., (2024), tujuan dari dilakukannya analisis laporan keuangan adalah:

“untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan agar pihak internal dan eksternal perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai bahan perbandingan dalam suatu periode mengenai pencapaian yang telah diperoleh, dan hasil dari analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan”.

Selain itu, menurut Ula et al. (2022) untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan:

“Data dari laporan keuangan dan analisis dilakukan dengan melakukan komparasi rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan solvabilitas sehingga didapatkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan manajemen perusahaan”.

Menurut Hery (2023), “tujuan dan manfaat dari dilakukannya analisis laporan keuangan adalah:

- 1) “Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, liabilitas, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai selama beberapa periode;”

- 2) “Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan;”
- 3) “Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaan;”
- 4) “Untuk menentukan Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;”
- 5) “Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen;”
- 6) “Sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis, terutama mengenai hasil yang telah dicapai”.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis laporan keuangan, menurut Weygandt et al. (2022), 3 alat yang biasa digunakan dalam menganalisis, yaitu sebagai berikut:

1) *Horizontal analysis*

Analisis horizontal merupakan teknik analisis untuk “mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu”. Analisis horizontal juga disebut sebagai analisis tren. Tujuan dari analisis ini adalah “untuk mengetahui kenaikan atau penurunan yang telah terjadi. Perubahan ini dapat dinyatakan dalam jumlah atau persentase”.

2) *Vertical analysis*

Analisis vertikal merupakan teknik analisis “yang menyatakan setiap item laporan keuangan sebagai persentase dari jumlah dasar”. Analisis vertikal juga disebut sebagai “analisis ukuran umum”.

3) *Ratio analysis*

Analisis rasio merupakan teknik analisis “yang mengungkapkan hubungan antara item-item tertentu dalam laporan keuangan”. Analisis rasio juga “menyatakan hubungan matematis antara satu besaran dengan besaran lainnya. Hubungan tersebut dinyatakan dalam persentase, tarif, atau proporsi sederhana”.

## 2.4 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Weygandt et al. (2022), analisis rasio merupakan analisis “yang mengungkapkan hubungan antara item-item tertentu dalam laporan keuangan”. Menurut Batubara dan Sipayung (2023), penggunaan analisis rasio keuangan bagi pemilik perusahaan diperlukan untuk:

“Menilai prestasi dan hasil yang dicapai oleh pihak manajemen ataupun sebagai dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Analisa rasio keuangan digunakan manajemen sebagai alat penghubung untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada pemiliknya setiap satu periode dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang baru”

Menurut Weygandt et al. (2022) “untuk menganalisa laporan keuangan utama, dapat digunakan rasio untuk mengevaluasi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas”. Rasio likuiditas merupakan “rasio yang mengukur apakah saat jatuh tempo, perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga” (Weygandt et al., 2022).

Atul et al. (2022) mendefinisikan rasio likuiditas sebagai berikut:

“Rasio likuiditas adalah rasio yang mewakili kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rasio likuiditas juga memiliki kemampuan untuk menunjukkan dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kewajibannya kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan”.

Menurut Salim dan Yanti (2023), likuiditas merupakan:

“Salah satu indikator yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang, terutama utang jangka pendek. Kemampuan perusahaan perlu diperhatikan agar perusahaan mampu mengelola keuangan dengan baik dan terhindar dari kesulitan keuangan. Pengendalian juga diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan berujung pada kesulitan keuangan hingga kebangkrutan”.

Menurut Weygandt et al. (2022), “rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, yaitu:

- 1) *Current Ratio*

Rasio likuiditas yang digunakan untuk “mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek”.

2) *Acid-test Ratio*

Rasio likuiditas yang digunakan untuk “mengukur likuiditas jangka pendek langsung”.

3) *Account Receivable Turnover*

Rasio likuiditas yang digunakan untuk “mengukur likuiditas piutang”.

4) *Inventory Turnover*

Rasio likuiditas yang digunakan untuk “mengukur likuiditas persediaan”.

Rasio profitabilitas merupakan “rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dalam kurun waktu tertentu yang didasari oleh efisiensi dan efektifitas dalam menggunakan asset” (Kartika dkk., 2020) dalam (Carina & Augustpaosa, 2022).

Menurut Weygandt et al. (2022), definisi rasio profitabilitas sebagai berikut:

“rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah pendapatan atau operasi perusahaan telah maksimal. Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pembiayaan utang, ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan untuk berkembang dipengaruhi oleh rasio profitabilitas”.

“Profitabilitas mencakup seluruh pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas dasar penggunaan aset dan pemenuhan liabilitas dalam suatu periode. Tingginya laba akan meningkatkan kesejahteraan para pemilik kepentingan dan memotivasi calon investor untuk berinvestasi” (Christy & Natalylova, 2023).

Menurut Fahmi (2013) dalam Ratuela et al. (2022), fungsi dari rasio profitabilitas yaitu:

“Profitabilitas mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan dengan penjualan maupun investasi. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan”.

Andre dan Taqwa (2014) dalam Yunika dan Rahmizal (2022) berpendapat bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh dalam memprediksi masalah keuangan dikarenakan:

“Semakin tinggi profitabilitas, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami masalah keuangan. Begitupun sebaliknya semakin rendah profitabilitas, semakin besar kemungkinan suatu perusahaan akan mengalami masalah keuangan. Nilai profitabilitas yang tinggi melambangkan tingkat keuntungan dan efisiensi perusahaan yang tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendapatan perusahaan”.

Menurut Weygandt et al. (2022), rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

1) *Profit Margin*

Rasio profitabilitas yang digunakan untuk “mengukur pendapatan bersih yang dihasilkan oleh setiap unit mata uang penjualan”.

2) *Asset Turnover*

Rasio profitabilitas yang digunakan untuk “mengukur seberapa efisien aset digunakan untuk menghasilkan penjualan”.

3) *Return on Asset*

Rasio profitabilitas yang digunakan untuk “mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan”.

4) *Return on Ordinary Shareholders' Equity*

Rasio profitabilitas yang digunakan untuk “mengukur profitabilitas investasi pemilik”.

5) *Earnings per Share (EPS)*

Rasio profitabilitas yang digunakan untuk “mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa”.

6) *Price-Earnings Ratio*

Rasio profitabilitas yang digunakan untuk “mengukur rasio harga pasar per saham terhadap laba per saham”.

7) *Payout Ratio*

Rasio profitabilitas yang digunakan untuk “mengukur persentase pendapatan yang didistribusikan dalam bentuk dividen tunai.”

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang “mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang” (Weygandt et al., (2022). Definisi Solvabilitas menurut Syah (2021) dalam Sari & Wahyuni (2023) yaitu, “solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan besarnya utang milik perusahaan yang dimanfaatkan untuk memodali kegiatan operasional perusahaan”. “Risiko bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya angka rasio total utang atau total aktiva maka akan semakin beresiko pula untuk perusahaan mengalami kesulitan keuangan” (Kasmir, 2019) dalam (Angriani et al., 2023). Menurut Weygandt et al. (2022), rasio yang dapat digunakan untuk menghitung solvabilitas perusahaan, yaitu:

1) *Debt to Assets Ratio*

Rasio solvabilitas yang digunakan untuk “mengukur persentase total aset yang disediakan oleh kreditor”.

2) *Times Interest Earned*

Rasio solvabilitas yang digunakan untuk “mengukur kemampuan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo”.

Menurut Riesmiyantiningtias & Siagian (2020) dalam Sitompul et al. (2023), “adapun tujuan analisa rasio laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) “Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan”
- 2) “Rasio dapat menjadi pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit”
- 3) “Rasio dapat mengukur posisi perusahaan ditengah industri lain”
- 4) “Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi (*Z-Score*)”
- 5) “Menstandarisir *size* perusahaan”
- 6) “Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain”
- 7) “Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang.”

Menurut Andre dan Taqwa (2019) dalam Wahyuni et al. (2023), manfaat dari penggunaan rasio keuangan adalah sebagai berikut:

“Rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi kesulitan keuangan bisnis untuk periode satu sampai lima tahun sebelum bisnis tersebut benar-benar bangkrut. Maka melalui analisis laporan keuangan akan diperoleh rasio-rasio keuangan perusahaan yang menggambarkan tentang kondisi keuangan perusahaan, rasio-rasio keuangan inilah yang merupakan indikator yang digunakan untuk memprediksi terjadinya *financial distress*”.

## 2.5 *Financial distress*

“*Financial distress is a condition where a company experiences financial difficulties before bankruptcy or liquidation actually occurs*” (Platt & Platt, 2002) dalam (Putri et al., 2024). Sedangkan menurut Marselina et al. (2023) dalam Dewi & Prabasari, (2024) “*Financial distress* merupakan peristiwa penurunan situasi pendanaan dengan penurunan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi sebelum perusahaan dinyatakan menghadapi kebangkrutan maupun likuidasi”.

Menurut Hanifah (2013) dalam Silanno dan Loupatty (2021), indikator perusahaan mengalami *financial distress* yaitu:

“Suatu perusahaan sedang mengalami tren kesulitan likuiditas, yang dapat dilihat dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (utang). Umumnya, *corporate financial distress* dapat dilihat dari tiga dimensi proses, yaitu *time frame*, *financial distress*, dan *process stages*. Proses terjadinya *financial distress* biasanya diawali dengan terjadinya penurunan kinerja keuangan hingga mencapai titik terendah. Jika perusahaan mampu bertransisi dan memperbaiki kinerjanya, maka terjadi tahap pemulihan. Namun, ketika suatu perusahaan mengalami fenomena kesulitan keuangan, kemudian dalam perjalanannya tidak mampu melakukan transisi ke arah pemulihan, maka perusahaan akan melanjutkan tren kesulitan keuangan yang lebih buruk. Jika kesulitan keuangan tersebut berlanjut hingga mencapai suatu titik tertentu, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan”.

Menurut Fachrudin (2008) dalam Silanno dan Loupatty (2021), “ada beberapa definisi kesulitan keuangan menurut tipenya, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Economic failure*

“Kegagalan ekonomi merupakan kondisi dimana pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya, termasuk *cost of capital*. Dalam

kondisi ini perusahaan dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur bersedia menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) yang di bawah pasar”.

2) *Business failure*

“Kegagalan bisnis merupakan keadaan dimana bisnis yang menghentikan operasi dengan alasan mengalami kerugian. Sudah tidak dapat melanjutkan aktivitas nya”.

3) *Technical insolvency*

“Kondisi perusahaan bisa dikatakan dalam keadaan *technical insolvency* jika suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya ketika jatuh tempo. Misalnya ketidakmampuan dalam membayar utang secara teknis menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kekurangan likuiditas yang bersifat sementara, yang mana mungkin di waktu ke depannya perusahaan bisa membayar utang dan bunganya tersebut. Tetapi, apabila *technical insolvency* merupakan gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin bisa menjadi sebuah tanda perhentian pertama menuju *bankruptcy*”.

4) *Insolvency in bankruptcy*

“*Insolvency in bankruptcy* terjadi sebelum *legal bankruptcy* dimana suatu perusahaan memiliki nilai buku utang melebihi nilai pasar asset saat ini. Keadaan ini dapat dianggap lebih serius jika dibandingkan dengan *technical insolvency*, karena pada umumnya hal tersebut merupakan tanda kegagalan ekonomi, yang jelas mengarah pada likuidasi bisnis. Perusahaan yang sedang mengalami keadaan seperti ini tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum”.

5) *Legal bankruptcy*

“Bisnis dianggap mengalami kebangkrutan secara hukum apabila perusahaan tersebut melaporkan kejadian dan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.

Faktor penyebab perusahaan mengalami *financial distress* menurut Salsabila et al. (2023) dalam Dewi dan Prabasari (2024), yaitu:

“Faktor internal penyebab *financial distress* berupa masalah arus kas, jumlah utang yang besar, ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, serta kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab *financial distress* adalah meningkatnya tingkat suku bunga, meningkatnya tarif pajak, keadaan kahar yang menyebabkan kelesuan ekonomi, dan lemahnya industri”.

Menurut Damodaran (1997) dalam Silanno dan Loupatty (2021), “faktor penyebab *financial distress* dari dalam perusahaan lebih bersifat mikro. Adapun faktor-faktor dari dalam perusahaan tersebut adalah:

- 1) Kesulitan arus kas  
“Terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil kegiatan operasi tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi perusahaan. Selain itu kesulitan arus kas juga bisa disebabkan adanya kesalahan manajemen ketika mengelola aliran kas perusahaan dalam melakukan pembayaran aktivitas perusahaan dimana dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan”.
- 2) Besarnya jumlah utang  
“Kebijakan pengambilan utang perusahaan untuk menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan utang di masa mendatang. Ketika tagihan jatuh tempo, sedangkan perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk melunasi tagihan-tagihan tersebut, maka kemungkinan yang dilakukan kreditur adalah melakukan penyitaan harta perusahaan untuk menutupi kekurangan pembayaran tagihan tersebut”.
- 3) Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun  
“Dalam hal ini merupakan kerugian operasional perusahaan yang dapat menimbulkan arus kas negatif dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena beban operasional lebih besar dari pendapatan yang diterima perusahaan”.

Menurut Fahmi (2011) dalam Silanno dan Loupatty (2021), “secara umum membagi kategori *financial distress* menjadi empat kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) “*Financial distress* kategori A (sangat tinggi dan benar-benar membahayakan)”

“Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit) dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan”.

- 2) “*Financial distress* kategori B (tinggi dan dianggap berbahaya)”

“Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiun dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan”.

- 3) “*Financial distress* kategori C (sedang dan dianggap masih bisa menyelamatkan diri)”

“Pada kondisi ini perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang dimiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali”.

- 4) “*Financial distress* kategori D (rendah)”

“Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat”.

“Kesulitan keuangan menjadi persoalan yang sangat serius, perlu adanya *early warning system* yang dapat dan mampu untuk mendeteksi serta memprediksi adanya potensi kebangkrutan, sehingga peran dari manajer akan sangat terbantu”

(Wibowo & Hidayah, 2023). Manfaat melakukan prediksi *financial distress* menurut Lau (2021), “prediksi *financial distress* ini sangat menarik banyak pihak. Pihak-pihak yang menggunakan model tersebut meliputi:

1) Pemberi pinjaman

“dengan mengetahui prediksi *financial distress* dapat memutuskan untuk memberi pinjaman, mengawasi pinjaman yang telah diberikan atau bahkan menarik pinjaman yang telah diberikan.”

2) Investor

“investor menggunakan pengetahuan tentang prediksi *financial distress* untuk mengevaluasi kemungkinan perusahaan dihadapkan pada masalah pelunasan kembali pokok dan bunga investasi.”

3) Regulator

“untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar utang dan menilai stabilitas perusahaan.”

4) Auditor

“Prediksi *financial distress* menjadi alat yang bermanfaat bagi auditor dalam mengevaluasi going concern suatu perusahaan”.

“Specifically, the Altman Z-Score model can predict the bankruptcy rate with up to 95% accuracy” (Al-Manaseer & Al-Oshaibat, 2018) dalam (Sriwiyanti et al., 2024). “Analisis kebangkrutan *Z-Score* merupakan suatu alat yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan formula” (Wahyuni et al., 2023).

Ishmah et al. (2022) menjelaskan alasan Altman memperkenalkan mode *Z-Score* yaitu dengan tujuan:

“Memprediksi kemungkinan kebangkrutan. Altman membentuk model ini dengan menerapkan *Multiple Discriminant Analysis (MDA)*. Teknik analisis ini dipilih karena dapat mengklasifikasikan paling banyak rasio keuangan berpengaruh dengan mempertimbangkan karakteristik umum perusahaan agar diperoleh garis linier kombinasi”.

Menurut Altman (1968) dalam Pertiwi dan Putri (2021), teknik statistik *MDA* yang digunakan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut “teknik statistik *MDA* ini mempertimbangkan keseluruhan profil karakteristik umum pada perusahaan yang relevan. Sedangkan teknik univariat hanya mempertimbangkan pengukuran pada perusahaan yang digunakan satu per satu”. Berikut ini merupakan model rasio diskriminan yang dikembangkan pada tahun 1968 menurut Altman & Hotchiks (2006) dalam (Pertiwi & Putri, 2021).

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5 \quad (2.1)$$

Keterangan:

$X_1$  = *Working Capital / Total Assets*

$X_2$  = *Retained Earnings / Total Assets*

$X_3$  = *EBIT / Total Assets*

$X_4$  = *Market Value of Equity / Book Value of Total Liabilities*

$X_5$  = *Sales / Total Assets*

Altman (1968) dalam Rizki dan Gandakusuma (2023), menjelaskan bahwa *Z-Score* dari perusahaan yang diteliti diklasifikasikan menjadi tiga zona, yaitu:

“*Z-Score* dari perusahaan-perusahaan yang diteliti diklasifikasikan dalam 3 zona. Apabila hasil perhitungan *Z-Score* perusahaan lebih besar dari 2,99, maka perusahaan akan diklasifikasikan pada *safe zone*. Sedangkan apabila hasil perhitungan *Z-Score* dibawah 1.81, maka akan diklasifikasikan pada *distress zone*. Kemudian apabila *Z-Score* diantara 1,81 dan 2,99, maka akan diklasifikasikan pada *gray area*”.

“Tingkat keakuratan rasio diskriminan ini mencapai 94 – 95% sehingga terbukti keakuratannya dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Dalam mengembangkan model rasio diskriminan ini, Altman (1968) menggunakan perusahaan publik pada sektor manufaktur sebagai sampel” (Pertiwi & Putri, 2021).

Menurut Idi & Borolla (2021), Altman mengembangkan beberapa model lanjutan *Z-Score* yaitu:

“Altman mengembangkan dua model lanjutan *Z-Score* dengan menggunakan sampel perusahaan swasta dan perusahaan non-manufaktur. Sehingga, model yang diupdate tersebut lebih relevan untuk semua perusahaan. Untuk perusahaan swasta, karena informasi harga saham tidak tersedia, Altman mengganti nilai pasar ekuitas (*Market Value of Equity*) pada variabel  $X_4$  dengan nilai buku ekuitas (*book value of equity*) pemegang saham”.

Berikut ini merupakan model rasio diskriminan yang dikembangkan pada tahun 1983 menurut Altman & Hotchiks (2006) dalam Pertiwi & Putri (2021).

$$Z' = ,717X_1 + ,847X_2 + 3,107X_3 + ,420X_4 + ,998X_5 \quad (2.2)$$

Keterangan:

$X_1$  = *Working Capital / Total Assets*

$X_2$  = *Retained Earnings / Total Assets*

$X_3$  = *EBIT / Total Assets*

$X_4$  = *Market Value of Equity / Book Value of Total Liabilities*

$X_5$  = *Sales / Total Assets*

“Perbedaan model *original* dan model untuk perusahaan privat ini terletak pada rasio  $X_4$  yang mana pada model tersebut menggunakan rasio nilai buku ekuitas terhadap total ekuitas. Adapun indeks klasifikasi berdasarkan skor yang diperoleh, dimana apabila *Z'-Score* lebih dari 2,90 maka perusahaan berada pada zona “*safe*”, apabila *Z'-Score* kurang dari 1,23 maka perusahaan berada pada zona “*distress*”, dan apabila *Z'-Score* diantara 1,23 sampai 2,90 maka perusahaan berada pada zona “*gray*” (Altman & Hotchiks, 2006, dalam Pertiwi dan Putri, 2021).

Pertiwi dan Putri (2021) menjelaskan bahwa modifikasi model selanjutnya adalah sebagai berikut:

“Modifikasi model selanjutnya dibuat dengan menghilangkan  $X_5$ , penjualan/total aset. Rasio ini dihilangkan dengan alasan untuk meminimalkan efek dari sektor industri yang sensitif dengan rasio ini. Kemudian, koefisien atau berat pembobotan pada model ini juga berbeda dengan model *original*. Model ini dikenal dengan *Emerging Market (EM) Score* dan ditandai dengan simbol  $Z''$ -Score. Model ini diklasifikasikan berdasarkan *Bond Rating Equivalent*”.

Altman (1983) dalam Rashid et al. (2023) menjelaskan kendala yang dihadapi dalam mengevaluasi model  $Z$ -Score, yaitu:

“Altman menghadapi kendala saat mengevaluasi model  $Z$ -Score pada sampel sekunder yang jatuh tempo karena tidak adanya database perusahaan swasta yang komprehensif. Terlepas dari kendala ini, ia melakukan analisis yang menekankan keakuratan model skor  $Z$  empat variabel. Model yang dimodifikasi ini menghilangkan rasio penjualan terhadap total aset ( $X_5$ ) dari model skor  $Z$  asli. Ia menemukan bahwa variabel-variabel yang sensitif terhadap kondisi industri, seperti perputaran aset, dapat menimbulkan bias. Altman bertujuan untuk meminimalkan pengaruh efek ini. Hasilnya, ia merumuskan model skor  $Z$  empat variabel berikutnya”.

Altman et al. (2017) dalam Nguyen et al. (2023) menjelaskan klasifikasi hasil  $Z''$ -Score sebagai berikut:

“Perhitungan 5 indikator pada model  $Z''$ -score serupa dengan model  $Z$ -Score. Dengan model  $Z''$ -score, perusahaan juga diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok 1 mencakup perusahaan yang berlokasi di zona aman dengan skor  $Z'' > 2,66$ . Kelompok kedua mencakup usaha yang berisiko bangkrut dan tergolong dalam zona peringatan dengan  $1,1 < Z'' < 2,6$ . Kelompok terakhir mencakup perusahaan dengan risiko tinggi, berada di zona merah dan berisiko tinggi bangkrut,  $Z'' < 1,1$ ”.

Berikut ini adalah rumus yang digunakan menurut Altman et al. (2017) dalam Nguyen et al. (2023).

$$Z'' = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4 \quad (2.3)$$

Rashid et al. (2023) menjelaskan bahwa Altman membuat penyesuaian lebih lanjut terhadap model  $Z''$ -Score, yaitu:

“Altman membuat penyesuaian lebih lanjut terhadap persamaan model dengan memasukkan konstanta tambahan sebesar 3,25. Modifikasi

strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas model ini dalam konteks negara-negara berkembang. Altman mempertahankan batasan dan bobot batas yang ditetapkan sebelumnya, yang berfungsi sebagai tolak ukur penting untuk mengkategorikan perusahaan ke dalam zona solvabilitas yang berbeda”.

Altman & Hotchkiss (2006) dalam Nguyen et al. (2023) menjelaskan klasifikasi dari model Altman  $Z''$ -Score yang sudah dimodifikasi yang diklasifikasikan menjadi tiga zona, yaitu:

“Kelompok 1 merupakan usaha yang aman, tidak terancam bangkrut,  $Z'' > 5,85$ . Kelompok 2 merupakan perusahaan yang berisiko bangkrut dan berada pada zona peringatan jika  $3,75 < Z'' < 5,85$ . Kelompok terakhir adalah kelompok perusahaan dengan  $Z < 3,75$ , kelompok perusahaan ini mempunyai risiko kebangkrutan yang sangat tinggi karena keadaan keuangan yang habis”

Rumus ini tepat digunakan dalam perusahaan subsektor *consumer services, apparel and luxury goods*, dan *media and entertainment* di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang. Menurut Dwi (2023), negara dibagi menjadi dua kategori utama yaitu sebagai berikut:

“Negara-negara di dunia terbagi menjadi dua kategori utama oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu negara maju dan negara berkembang. Klasifikasi tersebut berdasar kepada status ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), pendapatan per kapita, industrialisasi, standar hidup, dan lain-lain. Berdasarkan *World Population Review*, Indonesia berada di posisi ke-27 sebagai negara berkembang”.

Berikut ini adalah rumus yang digunakan menurut Altman et al. (2017) dalam Rashid et al. (2023).

$$Z'' = 3,25 + 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4 \quad (2.4)$$

Keterangan:

$X_1$  = *Working Capital / Total Assets*

$X_2$  = *Retained Earnings / Total Assets*

$X_3$  = *EBIT / Total Assets*

$$X_4 = \text{Book Value Equity} / \text{Total Liabilities}$$

1)  $X_1$  - *Working Capital / Total Assets*

“Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Modal kerja diperoleh dengan cara mengurangi aset lancar dengan liabilitas lancar” (Ramadhan et al., 2024). Selain itu, rasio ini juga dapat menjadi pengukuran likuiditas aset neto perusahaan relatif terhadap total kapitalisasi.

Kadim dan Sunardi (2018) dalam Mahmuda et al. (2023) menjelaskan definisi *Working Capital to Total Assets Ratio* sebagai berikut:

“Rasio *WC/TA* merupakan rasio modal kerja bersih terhadap aset total. Modal kerja yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki dana likuid untuk mencegah terjadinya kebangkrutan. Namun, jika modal kerja yang rendah menunjukkan perusahaan memiliki dana likuid, perusahaan akan kesulitan membiayai atau menutupi kesulitan keuangannya sehingga kebangkrutan sulit dicegah”.

Menurut Susanto et al. (2025) definisi dan manfaat dari *woring capital to total asset ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk:

“menilai tingkat aset lancar perusahaan dengan total modalnya. Selain itu, rasio ini juga berfungsi sebagai indikator kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan kelancaran suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Modal kerja digunakan untuk mendanai operasional perusahaan serta untuk mengatasi kesulitan keuangan yang timbul”

Berikut ini merupakan rumus perhitungan *working capital to total assets ratio* menurut Altman (1995) dalam Rohim et al. (2024).

$$X_1 = \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Assets}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

$$\text{Working Capital} = \text{Current Assets} - \text{Current Liability}$$

*Total Assets* = Total Aset

$X_1$  = *Working Capital to Total Asset Ratio*

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *working capital* perusahaan menurut Kieso et al. (2022) yaitu:

$$\text{Working Capital} = \text{Current Asset} - \text{Current Liability} \quad (2.6)$$

Definisi *working capital* atau modal kerja menurut Altman (1968) dalam Pertiwi dan Putri (2021) yaitu:

“Modal kerja adalah selisih antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada rasio ini, likuiditas dan karakteristik ukuran secara eksplisit dipertimbangkan. Pada umumnya, perusahaan yang mengalami kerugian operasional terus-menerus akan memiliki aset lancar yang menyusut terhadap *total asset*”.

Definisi aset menurut Kieso et al. (2022) aset merupakan:

“Sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti produksi dan penjualan, aset memiliki karakteristik umum yaitu memiliki kemampuan untuk memberikan jasa atau manfaat di masa yang mendatang”

Aset suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu *current asset* dan *non-current asset*. Menurut Kieso et al. (2022), *current assets* atau aset lancar merupakan “aset yang termasuk investasi tunai yang disimpan untuk tujuan perdagangan, dan aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam waktu satu tahun atau selama siklus operasinya”. Sedangkan *non current asset* merupakan “aset yang tidak dapat di konversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasinya”.

Menurut Hernawaty et al. (2021) fungsi dari *working capital to total asset ratio* adalah sebagai berikut:

“rasio ini mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid bersih dengan total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi dengan total kewajiban lancar (aset lancar-

utang lancar). Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan menurun lebih cepat ketimbang total asset sehingga menyebabkan rasio ini turun”.

Idi dan Borolla (2021) berpendapat terkait tinggi rendahnya modal kerja yaitu sebagai berikut:

“Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya”.

2)  $X_2$  - *Retained Earnings / Total Assets*

Menurut Harahap (2018) dalam Susanto et al. (2025), definisi dari *retained earning to total assets ratio* adalah rasio yang digunakan untuk:

“menentukan daya laba serta untuk menganalisis kapabilitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, dilihat dari kapabilitas perusahaan yang bersangkutan untuk mendatangkan keuntungan dibandingkan dengan kecepatan perputaran aktivitas operasi”.

“Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut”(Ramadhan et al., 2024). Selain itu, Altman (1968) dalam Pertiwi dan Putri (2021) menjelaskan bahwa *retained earning to total asset ratio* merupakan:

“Rasio profitabilitas yang mempertimbangkan usia perusahaan secara implisit dalam pengukurannya. Perusahaan yang masih relatif muda akan menunjukkan rasio *RE/TA* yang rendah karena keuntungan kumulatif yang masih relatif kecil. Dengan demikian, peluangnya untuk diklasifikasikan sebagai perusahaan yang bangkrut relatif lebih tinggi daripada perusahaan lain yang lebih tua. Namun, rasio ini secara *real* menunjukkan keadaan sebenarnya dimana kegagalan banyak terjadi di tahun-tahun awal perusahaan”.

Menurut Hernawaty et al. (2021), *retained earnings to total asset ratio* merupakan rasio yang mengukur:

“Besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran *operating assets* sebagai ukuran

efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi”.

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *retained earnings to total asset ratio* menurut Altman (1995) dalam Rohim et al. (2024).

$$X_2 = \frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total Assets}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

*Retained Earnings* = Laba Ditahan

*Total Assets* = Total Aset

$X_2$  = *Retained Earning to Total Assets Ratio*

*Retained earnings* adalah “*profits that are reallocated to the company*” (Sari et al., 2023). Menurut Sugiyono (2019) dalam Hariyanto dan Subardjo (2023),

“*Retained earning* adalah sebagian atau seluruh laba yang di peroleh perusahaan, yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Sifat *retained earning* yaitu menambah owner’s equity. Laba yang tidak dibagikan tersebut diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai dana internal perusahaan”

Menurut Mahmuda et al. (2023) hubungan *retained earnings to total assets ratio* yaitu:

“*RE/TA* yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan usaha perusahaan sehingga terhindar dari kebangkrutan, laba ditahan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan membayar utang perusahaan. Jika *RE/TA* rendah menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik, kondisi tersebut dapat membawa perusahaan menuju kebangkrutan”.

Menurut Susanto et al. (2025), menjelaskan hubungan *retained earning to total assets ratio* sebagai berikut:

“Rasio ini menggambarkan seberapa baik sebuah manajemen dengan pengelolaan produksi, penjualan, dan aktivitas operasional yang lain. Perusahaan yang mempunyai rasio tinggi menggambarkan bahwa

perusahaan tersebut mendanai aktivitya dari keuntungannya, sehingga bebas dari hutang yang besar. Hal tersebut dapat mengurangi probabilitas terjadinya risiko *financial distress*”.

3)  $X_3$  - *EBIT / Total Assets*

Menurut Harahap (2018) dalam Susanto et al. (2025), definisi dari *Earning Before Interest and Tax to Total Asset Ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk:

“Tujuan menentukan daya laba serta untuk menganalisis kapabilitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, dilihat dari kapabilitas perusahaan yang bersangkutan untuk mendatangkan keuntungan dibandingkan dengan kecepatan perputaran aktivitas operasi”.

Menurut Hernawaty et al. (2021), *EBIT to Total Asset ratio* didefinisikan sebagai rasio untuk mengukur:

“Tingkat pengembalian atas asset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Tax*) tahunan perusahaan dengan total asset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para investor”.

Menurut Ramadhan et al. (2024), *EBIT to Total Asset* didefinisikan sebagai berikut:

“Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasioal perusahaan sebelum dikurangi beban bunga dan pajak. Rasio ini dapat membandingkan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut”.

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *retained earnings to total asset ratio* menurut Altman (1995) dalam Rohim et al. (2024).

$$X_3 = \frac{EBIT}{Total Assets} \quad (2.8)$$

Keterangan:

*EBIT* = Laba sebelum Bunga dan Pajak

*Total Assets* = Total Aset

$$X_3 = \text{EBIT to Total Assets Ratio}$$

Definisi *Earning Before Interest and Tax* menurut Rahma Warnika dan Sri Utami (2024) dalam Bakar (2025) yaitu “laba yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan dalam satu periode tertentu dan merupakan komponen yang sangat penting yang dapat mempengaruhi prediksi pada arus kas di masa mendatang”.

Menurut Hu et al. (2023), definisi dari *EBIT* adalah sebagai berikut:

“*EBIT* adalah ukuran yang menunjukkan laba perusahaan sebelum memperhitungkan biaya bunga dan pajak. *EBIT* memberikan gambaran mengenai kinerja operasional perusahaan tanpa dipengaruhi oleh struktur pembiayaan dan kebijakan pajaknya. *EBIT* diukur dengan menggunakan laba sebelum bunga dan pajak yang tercatat dalam laporan laba rugi perusahaan. *EBIT* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasional bisnisnya sebelum memperhitungkan biaya bunga dan pajak”.

“Rasio ini adalah rasio yang menunjukkan produktivitas sebenarnya dari aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rasio  $X_3$  sangat sesuai digunakan untuk melakukan analisis mengenai kegagalan perusahaan” (Altman, 1968; Altman & Hotchiks, 2006, dalam Pertiwi & Putri, 2021). Menurut Mahmuda et al. (2023), hubungan *EBIT to Total Asset Ratio* dengan *financial distress* adalah sebagai berikut:

“jika *EBIT/TA* perusahaan tinggi maka kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dinilai efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi risiko kebangkrutan. Namun, jika *EBIT/TA* perusahaan rendah maka kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba sangat tidak efektif dan efisien, sehingga dapat memperbesar risiko kebangkrutan pada perusahaan”.

Menurut Nia (2025), hubungan antara *EBIT to total asset ratio* dengan *financial distress* adalah sebagai berikut:

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, tidak termasuk bunga dan pajak. Tingkat profitabilitas yang tinggi ditunjukkan oleh nilai yang tinggi. Dengan kata lain, rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan asetnya guna menghasilkan keuntungan. Nilai yang rendah menunjukkan kesulitan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan”.

4)  $X_4$  - *Book Value of Equity / Total Liabilities*

Menurut Rifki et al. (2025), *book value of equity to total liabilities ratio* memiliki definisi rasio yang digunakan untuk “menilai seberapa kuat struktur kemampuan modal perusahaan dalam memenuhi seluruh beban utang yang dimilikinya. Rasio ini termasuk ke dalam kategori rasio solvabilitas”. “Rasio ini membandingkan nilai buku ekuitas dengan nilai total buku utang. Variabel ini digunakan untuk mendeteksi kemampuan dana perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar dalam satu periode tertentu” (Maulida & Santoso, 2025). “Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dari nilai buku ekuitas” Ramadhan et al. (2024).

Pratiwi et al. (2022), menjelaskan definisi dari *book value equity to total liability ratio* sebagai berikut:

“Rasio Nilai Buku Ekuitas terhadap Total Kewajiban merupakan indikator mengapa suatu perusahaan tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena, dengan modal atau ekuitasnya, perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya”.

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *retained earnings to total asset ratio* menurut Altman (1995) dalam Rohim et al. (2024).

$$X_4 = \frac{\text{Book Value of Equity}}{\text{Total Liability}} \quad (2.9)$$

Keterangan:

*Book Value of Equity* = Nilai Buku Ekuitas

*Book Value of Total Liabilities* = Nilai Buku Total Liabilitas

$X_4$  = *Book Value of Equity to Total Liability Ratio*

Menurut Fahlevi (2023), definisi ekuitas serta sumber ekuitas perusahaan adalah sebagai berikut:

“Hak atau saham milik pemilik perusahaan, yang tercermin dalam catatan modal (modal saham), surplus dan akumulasi keuntungan. Atau dapat diartikan sebagai kelebihan nilai aktiva perusahaan atas seluruh kewajibannya. Pada dasarnya Ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas menurun terutama karena penarikan kepemilikan, pembagian keuntungan atau kerugian. Modal sendiri terdiri dari simpanan pemilik yang sering disebut modal atau simpanan modal anggota koperasi, akumulasi keuntungan dan komponen lainnya”.

Menurut Wardoyo (2022) dalam Fahlevi (2023), definisi liabilitas adalah sebagai berikut:

“Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Utang menimbulkan kewajiban yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengklaim aset perusahaan”.

“*Book value of equity* didapatkan dari selisih antara total aset dengan total utang, sedangkan *Total liabilities* merupakan penjumlahan antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang” (Rifki et al., 2025). “Rasio  $X_4$  yang positif menandakan bahwa perusahaan mampu menjaga dan mengelola ekuitas nya untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar. Namun, jika rasio  $X_4$  negatif mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu menjaga ekuitas nya untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar” (Nisa et al., 2024). Menurut Nia (2025), hubungan *book value of equity to total liability ratio* dengan *financial distress* adalah sebagai berikut:

“Rasio yang berfokus pada penilaian ketergantungan perusahaan pada pembiayaan modal. Rasio yang lebih rendah, dengan nilai pengembalian yang lebih tinggi, menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada ekuitas daripada utang, dan menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah pada utang. Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi, dengan nilai pengembalian yang lebih rendah, menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi pada utang daripada ekuitas. Semakin besar ketergantungan perusahaan pada pembiayaan utang, semakin tinggi risiko gagal bayar”.

Menurut Pratiwi et al. (2022), hubungan *book value of equity to total liability ratio* terhadap *financial distress* yaitu:

“Semakin tinggi Rasio Nilai Buku Ekuitas terhadap Total Kewajiban, semakin rendah jumlah utang yang terakumulasi terhadap modal

perusahaan. Namun, jika jumlah utang yang terakumulasi terhadap modal lebih besar daripada nilai buku ekuitas nya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya, di mana nilai buku ekuitas perusahaan yang lebih kecil daripada jumlah utang menunjukkan kerentanan terhadap kondisi kesehatan perusahaan”.

## 2.6 *Total Assets Turnover Ratio (TATO)*

“*Activity ratio* adalah rasio yang menentukan seberapa efisien sumber daya perusahaan digunakan, atau kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional nya” (Aisyah et al., 2017, dalam Kosasih & Widyasari, 2025). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan adalah *Total Assets Turnover Ratio (TATO)*. *Total Assets Turnover Ratio (TATO)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur “seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan” (Weygandt et al., 2022).

Menurut Kasmir (2019) dalam Gunawan dan Nariman (2024), *TATO* digunakan untuk:

“mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset serta keefisiensinya dalam mengelola sumber daya yang tersedia (penjualan, inventaris, dan penagihan utang). Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian harian kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas”.

Menurut Kasmir (2021) dalam Hidajat (2026), definisi dari rasio *total asset turnover*, yaitu sebagai berikut:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas Perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur aset yang dimiliki Perusahaan dan mengukur penjualan setiap rupiah. Apabila perusahaan mengalami perputaran aktivitas rendah, maka Perusahaan tersebut akan kesulitan untuk menggunakan aset yang dimiliki”.

Menurut Kasmir (2016) dalam Rafli dan Nurismalatri (2025), definisi serta fungsi dari *TATO* yaitu:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan

menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan”.

Fungsi dari *TATO* menurut Gunawan dan Nariman (2024), yaitu:

“Memaksimalkan dan mengefisienkan operasional perusahaan dan berguna untuk mengukur seberapa besar perputaran aset perusahaan, perusahaan dapat terlihat sejauh mana dapat mengelola aset tersebut apabila perusahaan melakukan perputaran aset”.

Berdasarkan Kieso et al. (2024), rumus yang digunakan untuk menghitung

*Total Assets Turnover*, yaitu:

$$\textit{Total Assets Turnover} = \frac{\textit{Net Sales}}{\textit{Average Total Assets}} \quad (2.10)$$

Keterangan:

*Net Sales* = Penjualan

*Average Total Assets* = rata-rata total aset

Menurut Kieso et al. (2022), berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *average total assets*.

$$\textit{Average Total Assets} = \frac{\textit{Total Beginning Assets} - \textit{Total Ending Assets}}{2} \quad (2.11)$$

Definisi *net sales* menurut Kieso et al. (2024), yaitu “*sales revenue less sales return and allowance and less sales discounts*”. *Sales discount* merupakan “pengurangan yang diberikan oleh penjual untuk pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan atas penjualan kredit”. Sementara itu *sales return and allowance* adalah “transaksi dimana penjual menerima pengembalian barang dari pembeli (retur) atau memberikan pengurangan harga pembelian agar pembeli tetap mempertahankan barang tersebut” (Weygandt et al., 2022).

Menurut Kieso et al. (2024) untuk mengukur dan mencatat jumlah pendapatan yang diakui, terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. “Identifikasi kontrak dengan pelanggan”
2. “Identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terpisah dalam kontrak”
3. “Menentukan harga transaksi”
4. “Mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban pelaksanaan yang terpisah”
5. “Mengakui pendapatan ketika masing-masing kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi”

Berikut ini merupakan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan IAI (2026) dalam PSAK 201:



<b>KELOMPOK USAHA XYZ</b>		
<b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7</b>		
(dalam ribuan rupiah)		
	<b>20X7</b>	<b>20X6</b>
<b>Pendapatan</b>	390.000	355.000
Beban Pokok Penjualan	<u>(245.000)</u>	<u>(230.000)</u>
Laba Bruto	145.000	125.000
Penghasilan Lain	20.667	11.300
Biaya distribusi	(9.000)	(8.700)
Beban administrasi	(20.000)	(21.000)
Beban lain-lain	(2.100)	(1.200)
Biaya pendanaan	(8.000)	(7.500)
Bagian laba entitas asosiasi	<u>35.100</u>	<u>30.100</u>
<b>Laba sebelum pajak</b>	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	(40.417)	(32.000)
<b>Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan</b>	121.250	96.000
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	(30.500)
<b>Laba tahun berjalan</b>	<u>121.250</u>	<u>65.500</u>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>		
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Keuntungan revaluasi aset tetap	933	3.367
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(667)	1.333
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi <sup>2</sup>	400	(700)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi <sup>3</sup>	<u>(166)</u>	<u>(1.000)</u>
	500	3.000
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan <sup>4</sup>	5.334	10.667
Aset keuangan tersedia untuk dijual <sup>4</sup>	(24.000)	26.667
Lidung nilai atas arus kas <sup>4</sup>	(667)	(4.000)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi <sup>3</sup>	<u>4.833</u>	<u>(8.334)</u>
	<u>(14.500)</u>	<u>25.000</u>
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>	<u>(14.000)</u>	<u>28.000</u>
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	<u>107.250</u>	<u>93.500</u>
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	97.000	52.400
Kepentingan nonpengendali	<u>24.250</u>	<u>13.100</u>
	<u>121.250</u>	<u>65.500</u>
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	85.800	74.800
Kepentingan nonpengendali	<u>21.450</u>	<u>18.700</u>
	<u>107.250</u>	<u>93.500</u>
Laba per saham (dalam rupiah):		
Dasar dan dilusian	0,46	0,30

Gambar 2. 1 Format Penyajian Laporan Laba Rugi

Sumber: IAI (2026)

Menurut Weygandt et al. (2022), definisi *asset* yaitu:

“sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti produksi dan penjualan, aset memiliki karakteristik umum yaitu memiliki kemampuan untuk memberikan jasa atau manfaat di masa yang mendatang”.

Aset suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu *current asset* dan *non-current asset*. Menurut Weygandt et al. (2022), *current assets* atau aset lancar merupakan “*assets including cash investment held for trading purposes, and assets that a company expects to convert to cash or use up within one year or its operating cycle, whichever is longer*”, atau bisa diartikan sebagai “aset yang termasuk investasi tunai yang disimpan untuk tujuan perdagangan, dan aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam waktu satu tahun atau selama siklus operasinya”.

Salah satu komponen *current asset* adalah persediaan. Menurut IAI (2025) dalam PSAK 202, persediaan merupakan aset:

- a. “dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal”;
- b. “dalam proses produksi untuk penjualan tersebut”;
- c. “dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa”.

Selain itu, persediaan juga meliputi “barang yang dibeli dan dikuasai untuk dijual kembali termasuk, sebagai contoh, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer dan dikuasai untuk dijual kembali, atau tanah dan properti lainnya yang dikuasai untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang jadi yang diproduksi, oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi”.

Menurut IAI (2025) dalam PSAK 202, “persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto”. Nilai realisasi neto merupakan “estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan”. Biaya persediaan merupakan biaya yang “timbul sampai persediaan berada dalam kondisi lokasi saat ini”, yang terdiri dari:

- a. “Biaya Pembelian”  
“Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada

otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat dan item serupa lain dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian”.

b. “Biaya Konversi”

“Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan item yang diproduksi, seperti biaya tenaga kerja langsung. Termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi, seperti depresiasi dan pemeliharaan bangunan pabrik, peralatan dan aset hak-guna yang digunakan dalam proses produksi, dan biaya manajemen dan administrasi pabrik. Overhead produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung, atau hampir secara langsung, mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung”.

c. “Biaya Lain”

“Biaya lain termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Sebagai contoh, mungkin tepat untuk memasukkan overhead nonproduksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan tertentu sebagai biaya persediaan”.

Menurut IAI (2025) dalam PSAK 202, pengakuan beban atas persediaan yaitu:

“Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pembalikan penurunan nilai persediaan karena peningkatan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pembalikan tersebut”.

Sedangkan, *non-current assets* merupakan aset yang tidak dapat di konversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasinya. Dalam Weygandt et al. (2022), *non-current assets* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. “*Long-term investment*”

“merupakan investasi yang secara umum berjenis: (1) investasi dalam saham dan obligasi perusahaan lain yang biasanya dimiliki perusahaan selama bertahun-tahun; (2) aset tidak lancar, seperti tanah dan bangunan yang saat ini tidak digunakan dalam kegiatan operasional; dan (3) piutang wesel jangka panjang”.

2. “*Intangible Assets*”

“merupakan aset jangka Panjang yang tidak memiliki wujud fisik. Aset yang termasuk dalam kategori *intangible* diantaranya, yaitu *goodwill*. Aset lainnya yaitu termasuk paten, hak cipta, dan merek dagang atau nama dagang yang memberikan hak penggunaan eksklusif kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu”.

3. “*Property, Plant, and Equipment*”

“merupakan aset yang memiliki umur panjang dan sedang digunakan untuk operasional. Kategori ini termasuk tanah, bangunan, mesin dan peralatan, alat pengiriman, dan furnitur”.

Renantha dan Sudirgo (2022), berpendapat bahwa “semakin efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*”. Tania dan Wijaya (2021) juga berpendapat bahwa:

“Semakin tinggi nilai *operating capacity (TATO)*, artinya perusahaan memiliki perputaran aset yang cepat sehingga laba dan pemakaian aset dalam menghasilkan penjualan semakin optimal. Dengan nilai yang tinggi berarti penjualan relatif besar dibandingkan dengan jumlah aset yang sama, sehingga kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* semakin kecil”.

Pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan subsektor *consumer services, apparel and luxury goods*, dan *media and entertainment*. Berikut merupakan jenis aset tidak lancar perusahaan subsektor *consumer services, apparel and luxury goods*, dan *media and entertainment*.

1. Aset tetap kerjasama  
“aset tetap yang dibiayai secara bersama-sama oleh RCTI dan SCTV untuk kegiatan operasional siaran nasional (*nationwide*)” (Noersing, 2024).
2. Aset tidak berwujud berupa *digital streaming platform*  
“aplikasi RCTI+ (AVOD superapp) & Vision+ (SVOD superapp), yang merupakan pengembangan platform streaming digital atas perangkat lunak, lisensi dan penayangan program konten, dan platform portal digital” (Noersing, 2024).
3. Tanah belum dikembangkan  
“tanah mentah yang belum dikembangkan” (Darmadi, 2025).
4. Hak atas tanah  
“biaya legal atas perpanjangan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Grup dengan sisa masa berlaku antara 3 (tiga) sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun” (Darmadi, 2025).
5. Aset Perangkat Lunak  
“aplikasi yang digunakan oleh Kelompok Usaha untuk kegiatan operasional” (Hartono, 2024).
6. Biaya perolehan pelanggan  
“Penambahan biaya perolehan pelanggan termasuk jumlah yang dibayarkan untuk setiap pelanggan baru yang berhasil diperoleh” (H. Tanoesoedibjo, 2024).

## **2.7 Pengaruh *Total Assets Turnover Ratio* terhadap *financial distress***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Oktariyani (2019) dalam Afriyani dan Nurhayati (2023) pengaruh *total assets turnover ratio* terhadap *financial distress* yaitu:

“*Financial distress* terjadi ketika tingginya nilai rasio aktivitas pada perusahaan akan mempengaruhi nilai *Z-Score*, dimana ketika nilai aktivitas tinggi maka nilai *Z-Score* juga akan tinggi dan sebaliknya. Sehingga, dengan tingginya nilai *Z-Score*, maka kemungkinan akan terjadinya *Financial distress* menjadi kecil. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa semakin banyak aktivitas yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba, sehingga kemungkinan kecil terjadinya *Financial distress* pada perusahaan”

Menurut Nora (2016) dalam Wijaya dan Rasyid (2022), hubungan *TATO* dengan *financial distress*, yaitu:

“Semakin tinggi rasio aktivitas (*TATO*), maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* semakin rendah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang sehat dan memberikan sinyal yang positif bagi investor. Sedangkan rasio aktivitas yang semakin rendah, maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* semakin besar. Ini menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi yang buruk dan memberikan sinyal yang buruk atau negatif bagi investor”.

“Rasio aktivitas (*TATO*) yang semakin tinggi berarti perusahaan menggunakan aktivitya dengan efisien sehingga menghasilkan penjualan yang tinggi dan kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* semakin kecil” (Wijaya & Rasyid, 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahrani dan Lasar (2025), “variabel independen *operating capacity (TATO)* berpengaruh negatif terhadap variabel dependen *financial distress*”. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Nariman (2024), “dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel *operating capacity (TATO)* bernilai positif menunjukkan hubungan negatif antara *operating capacity (TATO)* dengan *financial distress*”. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kosasih dan Widyasari (2025) menyatakan bahwa “*activity ratio (TATO)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*”. Hasil yang berbeda juga didapat oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiarmaja (2023), “*total asset turnover have no relationship and effect with financial distress*”. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif pertama dari penelitian ini yaitu:

**Ha<sub>1</sub> : *TATO (Total Assets Turnover)* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.**

## 2.8 *Current Ratio (CR)*

“*Current ratio*, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan” (Weygandt et al., 2022). Menurut Kasmir (2008:134-135) dalam Silanno & Loupatty (2021), definisi *current ratio* adalah sebagai berikut:

“Rasio lancar atau *current ratio* ini juga menunjukkan efisiensi siklus operasi perusahaan atau kemampuannya mengubah produk menjadi uang tunai. Rasio Lancar atau *Current Ratio* yang merupakan salah satu Analisis Rasio Likuiditas ini juga dikenal dengan rasio modal kerja (*working capital ratio*). Rasio Lancar dihitung dengan membagikan Aktiva Lancar (*current assets*) dengan Kewajiban atau Utang Lancar (*current liabilities*)”.

Jika rasio *CR* yang dimiliki oleh perusahaan tinggi, “maka perusahaan dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya” (Dirman, 2020) dalam (Christy & Natalylova, 2023). Sedangkan apabila rasio *CR* rendah, maka “semakin rendah likuiditas suatu perusahaan yang menandakan bahwa perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya” (Wardoyo et al., 2022). Dalam Kieso et al. (2024), *current ratio* dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liability}} \quad (2.12)$$

Keterangan:

*Current Asset* = Aset Lancar

*Current Liability* = Kewajiban Lancar

Definisi *current assets* menurut Weygandt et al. (2022), “*assets, including cash, investments held for trading purposes, and assets that a company expects to convert to cash or use up within one year or its operating cycle, whichever is longer*”. Sehingga bisa diartikan bahwa *current asset* merupakan “aset, termasuk

uang tunai, investasi yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, dan aset yang diperkirakan akan diubah menjadi uang tunai atau digunakan oleh perusahaan dalam waktu satu tahun atau siklus operasinya, mana saja yang lebih lama”.

Menurut IAI (2026) dalam PSAK 201, “entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- a. “entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;”
- b. “entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;”
- c. “entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
- d. “aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

“Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar”.

Pada PSAK 201, dijelaskan juga mengenai siklus operasi untuk mengklasifikasikan suatu aset yaitu:

“Ketika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus diasumsikan selama dua belas bulan. Aset lancar termasuk aset (seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset utamanya dimiliki untuk diperdagangkan dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar”.

Berdasarkan Kieso et al. (2022), *current assets* dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. *cash*
2. *investment (such short-term government securities)*

3. *receivables (notes receivable, account receivable, and interest receivable)*
4. *inventories, and*
5. *prepaid expenses (supplies and insurance)*

Definisi *current liability* menurut Weygandt et al. (2022), “*obligations related to operations that a company expects to pay within the coming year or its operating cycle, whichever is longer, and obligations related to financing that will be paid in the next year*”. Sehingga bisa diartikan bahwa *current liability* merupakan “kewajiban terkait operasi yang diperkirakan akan dibayar oleh perusahaan pada tahun mendatang atau siklus operasinya, mana yang lebih panjang, dan kewajiban terkait pembiayaan yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya”.

Tania dan Wijaya (2021) berpendapat bahwa hubungan *current ratio* dengan *financial distress* adalah sebagai berikut:

“*Liquidity (CR)* diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan perusahaan dalam keadaan likuid, perusahaan harus memiliki aset lancar lebih besar dari kewajiban lancarnya. Apabila terdapat terlalu banyak kewajiban finansial yang jatuh tempo pada suatu perusahaan, hal ini dapat menyebabkan kondisi *financial distress*”.

Pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan subsektor *consumer services, apparel and luxury goods*, dan *media and entertainment*. Berikut merupakan jenis aset lancar perusahaan subsektor *consumer services, apparel and luxury goods*, dan *media and entertainment*.

1. Uang muka program  
“Pembayaran dimuka atas pembelian program lokal dan asing dan pembuatan program produksi sendiri” (Noersing, 2024).
2. Perlengkapan operasi hotel  
“Perlengkapan operasi hotel meliputi *linen, chinaware, glassware, silverware* dan seragam” (Abdat, 2024).
3. Perlengkapan dan peralatan gerai

“Persediaan untuk keperluan gerai yang akan digunakan dalam siklus operasi normal dan uang jaminan yang merupakan deposit atas sewa dan biaya layanan gerai yang dapat dikembalikan kepada penyewa jika sewanya berakhir dalam jangka waktu tertentu” (Ching, 2024).

Berdasarkan IAI (2026) dalam PSAK 2021, “entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:”

- a. “entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;”
- b. “entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan;”
- c. “liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
- d. “entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Berdasarkan IAI (2026) dalam PSAK 2021 liabilitas jangka pendek seperti utang usaha dan beberapa akrual merupakan bagian dari:

“Modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas. Entitas mengklasifikasikan item operasi tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal entitas diasumsikan dua belas bulan”.

“Liabilitas jangka pendek lain tidak dilunasi sebagai bagian dari siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki dengan tujuan utama untuk diperdagangkan. Contohnya beberapa liabilitas keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan yang menyediakan pembiayaan jangka panjang (yaitu bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi

normal entitas) dan tidak jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang” (IAI, 2026).

“Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun:”

- a. “kesepakatan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan”
- b. “perjanjian untuk pembiayaan kembali, atau penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit”.

Pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan subsektor *consumer services, apparel and luxury goods*, dan *media and entertainment*. Berikut merupakan jenis utang jangka pendek perusahaan subsektor *consumer services, apparel and luxury goods*, dan *media and entertainment*.

1. Akrua Operasional  
“cadangan atas biaya produksi program” (A. H. Tanoesoedibjo, 2024).
2. Uang muka terima  
“Penerimaan pembayaran di muka atas penggunaan fasilitas yang disediakan oleh hotel”.
3. Uang muka pelanggan  
“uang muka yang diterima dari agen iklan atas penjualan iklan” (Widarmana, 2024).
4. Uang jaminan dari penyalur  
“Merupakan setoran yang diterima dari penyalur sebagai jaminan atas persediaan yang dikirimkan ke toko, yang akan dikembalikan setelah perjanjian penyalur berakhir” (Ghosh, 2024).

## 2.9 Pengaruh *Current Ratio* terhadap *financial distress*

Menurut Triwahyuningtias dan Muharam (2012) dalam Renantha dan Sudirgo (2022), pengaruh *current ratio* terhadap *financial distress* yaitu:

“*Current ratio* merupakan alat prediksi yang digunakan untuk mengukur likuiditas sebuah perusahaan. Rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan mempunyai arti yakni kemampuan suatu perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban utang lancar perusahaan dengan memanfaatkan aset lancar yang dimilikinya. Semakin besar tingkat *current ratio* maka semakin kecil potensi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengalami *financial distress*”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Suhendah (2023), hubungan *current ratio* dengan *financial distress* yaitu:

“Likuiditas (*CR*) menjelaskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi utang lancar. Perusahaan yang mempunyai utang jangka pendek dalam jumlah besar dibandingkan dengan jumlah assetnya memberi indikasi bahwa perusahaan berada dalam kondisi tidak likuid. Perusahaan tersebut berisiko tinggi dan dapat mengalami *financial distress* karena perusahaan tidak mampu memenuhi pembayaran utang jangka pendek. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, semakin rendah perusahaan mengalami kondisi *financial distress*”.

Menurut Yunica dan Yuniarwati (2021), definisi *current ratio* adalah sebagai berikut:

“*Current ratio* dihitung dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Semakin besar tingkat *current ratio*, maka potensi suatu perusahaan mengalami *financial distress* semakin rendah. Perhitungan *current ratio* dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban utang jangka pendeknya yang jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan. Apabila total aktiva yang dimiliki suatu perusahaan lebih kecil dari total kewajiban utang jangka pendeknya, berarti perusahaan tersebut berpotensi mengalami *financial distress*”.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Silanno dan Loupatty (2021) dan Sinaga et al. (2024), “variabel *CR* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* (*Z-Score*)”. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviyana et al. (2024), menunjukkan bahwa “*current ratio* berpengaruh secara negatif terhadap *financial distress*”. Penelitian lain yang dilakukan oleh J. Wijaya dan

Suhendah (2023), menyatakan bahwa “variabel likuiditas yang dihitung dengan menggunakan proksi *current ratio (CR)* menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*”. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim & Yanti (2023), yang menyatakan bahwa, “*liquidity (CR) has a significant and positive effect on financial distress*”. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif kedua dalam penelitian ini yaitu:

**Ha<sub>2</sub> : *CR (Current Ratio)* memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress***

### 2.10 *Debt to Equity Ratio (DER)*

Menurut Theoprata dan Bangun (2025), definisi dari rasio *leverage* yaitu:

“Rasio *leverage* ini mampu memberikan gambaran yang jelas tentang stabilitas keuangan perusahaan dalam kondisi ekstrim. Lebih lanjut, *leverage* menggambarkan sejauh mana hutang digunakan untuk membiayai aset perusahaan, atau dengan kata lain, bagaimana hutang mempengaruhi pengelolaan aset perusahaan”.

“Rasio *leverage* juga menjadi alat yang penting ketika sebuah perusahaan berada dalam situasi seperti likuidasi atau pembubaran. Dalam situasi seperti itu, rasio ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya” (Kasmir, 2019, dalam Theoprata & Bangun, 2025). Salah satu rasio *leverage* yang umum digunakan adalah *Debt to Equity Ratio (DER)*.

Menurut Silanno dan Loupatty (2021), definisi dari *debt to equity ratio* adalah sebagai berikut:

“*Debt to equity ratio (DER)* merupakan satu ukuran perbandingan antara total utang perusahaan dibanding dengan ekuitas perusahaan. *Debt to equity ratio* menunjukkan seberapa besar tingkat utang perusahaan terhadap modalnya. Semakin besar nilai *debt to equity ratio*, maka dapat diartikan bahwa sumber keuangan perusahaan akan semakin besar dibiayai oleh pemberi utang, bukan oleh sumber keuangannya sendiri. Hal ini merupakan pertanda buruk bagi keuangan perusahaan”.

“*DER* juga seringkali dijadikan menjadi syarat dalam mendapatkan investasi dari para investor. Para investor tentu tidak ingin sembarangan

menginvestasikan uangnya di perusahaan yang tidak memiliki kestabilan dan kesehatan keuangan yang baik” (Silanno & Loupatty, 2021). “*Debt to equity ratio* dengan fungsi untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pemegang saham dengan pemilik perusahaan. Rasio ini merupakan rasio penting guna untuk memeriksa kesehatan keuangan dalam Perusahaan”(Dewi et al., 2022).

“Rasio *DER* yang semakin tinggi menandakan besaran perusahaan yang didanai dari utang dan semakin besar risiko *default* perusahaan” (Angriani et al., 2023). “Semakin rendah *Debt To Equity Ratio* maka semakin baik kondisi fundamental perusahaan yang menunjukkan besarnya utang perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki” (Wardoyo et al., 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Theoprata dan Bangun (2025), rumus yang digunakan untuk menghitung *DER*, yaitu:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}} \quad (2.13)$$

Keterangan:

*Total Liability* = Total Utang

*Total Equity* = Total Modal

Definisi *liabilities* menurut Weygandt et al. (2022), “*Liabilities are claims against assets—that is, existing debts and obligations. Businesses of all sizes usually borrow money and purchase merchandise on credit,*” hal ini bisa diartikan bahwa “kewajiban merupakan klaim terhadap aset yaitu utang dan kewajiban yang ada. Bisnis dari semua ukuran biasanya meminjam uang dan membeli barang dagangan secara kredit”. Sedangkan menurut Hidayat (2018) dalam Wardoyo et al. (2022), liabilitas merupakan:

“Semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum dibayarkan, yang mana utang ini merupakan kekayaan perusahaan yang berasal dari kreditor dan dapat dibedakan ke dalam utang lancar (jangka pendek) dan utang jangka panjang. Utang lancar atau utang jangka

pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan”.

Berdasarkan IAI (2026), “Untuk tujuan mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, pelunasan mengacu pada pengalihan ke pihak lawan yang mengakibatkan pengakhiran liabilitas. Pengalihan dapat berupa:

- a. “kas atau sumber daya ekonomik lainnya—misalnya, barang atau jasa; atau”
- b. “instrumen ekuitas entitas sendiri.”

Menurut IAI (2026) dalam PSAK 201 terkait penyajian laporan keuangan, liabilitas dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang “ketika hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas tersebut tidak tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Definisi *equity* menurut Weygandt et al. (2022), “*The ownership claim on a company’s total assets is equity. Equity generally consists of (1) share capital-ordinary and (2) retained earning*”. Hal ini bisa diartikan bahwa “ekuitas merupakan sebuah klaim kepemilikan atas total aset perusahaan. Ekuitas pada umumnya terdiri atas (1) modal saham biasa dan (2) laba ditahan”.

1) *Share Capital-Ordinary*

“istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham atas saham biasa yang mereka beli.”

2) *Retained Earnings*

“*retained earnings* ditentukan oleh tiga item: pendapatan, beban, dan dividen”.

Selain itu, menurut Kieso et al. (2024), ekuitas merupakan “salah satu bagian yang paling sulit untuk disusun dan dipahami. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas perjanjian saham biasa dan saham preferen serta berbagai batasan pada ekuitas yang diberlakukan oleh hukum perusahaan, perjanjian liabilitas (utang), dan dewan direksi. Perusahaan biasanya membagi bagian ini menjadi enam bagian:”

1. “Share Capital”

“Nilai nominal atau nilai ditetapkan dari saham yang diterbitkan. Ini mencakup saham biasa (*ordinary shares*) dan saham preferen (*preference shares*)”. Menurut Kieso et al. (2024), berikut merupakan contoh pencatatan jurnal umum *share capital*:

a) “Share Capital - Ordinary”

1 Jan 2026	Cash	xxx	
	Share Capital - Ordinary		xxx
1 Jan 2026	Cash	xxx	
	Share Capital - Ordinary		xxx
	Share Premium - Ordinary		xxx

b) “Share Capital – Preference”

1 Jan 2026	Cash	xxx	
	Share Capital - Preference		xxx
	Share Premium - Preference		xxx

2. “Share Premium”

“Kelebihan jumlah yang disetor di atas nilai nominal atau nilai ditetapkan”. Menurut Kieso et al. (2024), berikut merupakan contoh pencatatan jurnal umum *share premium*:

1 Jan 2026	Cash	xxx	
	Share Capital - Ordinary		xxx
	Share Premium - Ordinary		xxx

3. “Retained Earnings”

“Laba perusahaan yang belum didistribusikan”. Menurut Kieso et al. (2024), berikut merupakan contoh pencatatan jurnal umum *retained earnings*:

a) “To close net income to retained earnings”

1 Jan 2026	Income Summary	xxx	
	Retained Earnings		xxx

b) “To close dividends to retained earnings”

1 Jan 2026	Retained Earnings	xxx	
	Dividends		xxx

4. “Accumulated Other Comprehensive Income”

“Jumlah agregat dari pos-pos penghasilan komprehensif lain”.

Menurut Kieso et al. (2024), berikut merupakan contoh pencatatan

jurnal umum *accumulated other comprehensive ncome*:

a) “Revaluation: Recovery of Impairment Loss”

1 Jan 2026	Land	xxx	
	Unrealized Gain or Loss		xxx
	Recovery Impairment Loss		xxx
1 Jan 2026	Unrealized Gain or Loss	xxx	
	Accumulated Other Comprehensive Income		xxx
1 Jan 2026	Accumulated Other Comprehensive Income	xxx	
	Retained Earnings		xxx

5. “Treasury Shares”

“ Umumnya, jumlah saham biasa yang dibeli kembali”. Menurut

Kieso et al. (2024), berikut merupakan contoh pencatatan jurnal

umum *treasury shares*:

a) “Purchase”

1 Jan 2026	Treasury Shares	xxx	
	Cash		xxx

b) “Sale of Treasury Above Cost”

1 Jan 2026	Cash	xxx	
	Treasury Shares		xxx
	Share Premium - Treasury		xxx

c) “Sale of Treasury Below Cost”

1 Jan 2026	Cash	xxx	
------------	------	-----	--

<i>Share Premium - Treasury</i>	xxx
<i>Treasury Shares</i>	xxx

6. “*Non-Controlling Interest*”

“Porsi ekuitas entitas anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”. Menurut Jeter & Chaney (2023), berikut merupakan contoh pencatatan jurnal umum *non-controlling interest*:

1 Jan 2026	<i>Common Stock</i>	xxx
	<i>Other Contributed Capital</i>	xxx
	<i>Investment in Subsidiary</i>	xxx
	<i>Non Controlling Interest</i>	xxx

Alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham yang beredar menurut Kieso et al. (2024), yaitu:

1. “Untuk menyediakan distribusi kas berlebih yang efisien secara pajak kepada pemegang saham. Tarif pajak atas penjualan saham kembali ke perusahaan oleh pemegang saham sering kali jauh lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan biasa bagi banyak investor”.
2. “Untuk meningkatkan laba per saham (*earnings per share*) dan imbal hasil atas ekuitas (*return on equity*). Mengurangi jumlah saham beredar dan ekuitas sering kali meningkatkan rasio kinerja tertentu”.
3. “Untuk menyediakan saham bagi kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan potensi merger”.
4. “Untuk menggagalkan upaya pengambilalihan (*takeover*) atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah saham yang dipegang oleh publik, pemilik hak tanggungan dan manajemen yang ada dapat menghalangi "pihak luar" untuk mendapatkan kendali atau pengaruh signifikan”.
5. “Untuk membentuk pasar bagi saham tersebut”.

Menurut IAI (2026) dalam PSAK 201, “entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan:”

- a. “Untuk setiap jenis modal saham:”
  - i. “Jumlah saham modal dasar;”
  - ii. “jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;”
  - iii. “nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal;”
  - iv. “rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode;”
  - v. “hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian dividen dan pelunasan atas modal;”
  - vi. “saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau oleh entitas asosiasi; dan”
  - vii. “saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan; dan”
- b. “deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas”.

Menurut Ma'arif dan Rahayu (2022) dalam Theoprata dan Bangun (2025), hubungan *debt to equity ratio* dengan *financial distress*, yaitu:

“*leverage (DER)* yang tinggi terkait dengan jumlah pinjaman korporasi yang relatif besar. Informasi tersebut dapat digunakan oleh investor untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif yang tersedia guna mendapatkan laba atas investasi mereka. Perusahaan yang memiliki lebih banyak hutang daripada aset, dan sangat bergantung pada pembiayaan hutang, berisiko mengalami kesulitan ketika harus melakukan transaksi di masa depan. Jika masalah tidak ditangani secara bijak, risiko perusahaan untuk menghadapi masalah keuangan menjadi lebih meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan leverage yang berlebihan dapat meningkatkan potensi sebuah perusahaan untuk menghadapi masalah keuangan”.

Pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan subsektor *consumer services, apparel and luxury goods*, dan *media and entertainment*. Berikut merupakan jenis utang jangka pendek perusahaan subsektor *consumer services, apparel and luxury goods*, dan *media and entertainment*.

1. Uang muka terima hotel

“Penerimaan pembayaran di muka atas penggunaan fasilitas yang disediakan oleh hotel”.

2. Uang jaminan dari penyalur

“Merupakan setoran yang diterima dari penyalur sebagai jaminan atas persediaan yang dikirimkan ke toko, yang akan dikembalikan setelah perjanjian penyalur berakhir” (Ghosh, 2024).

## 2.11 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap *financial distress*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noviyana et al. (2024), hubungan *debt to equity ratio* terhadap *financial distress* yaitu

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang dapat mengukur besarnya modal yang didanai oleh utang, atau perbandingan total modal yang dimiliki oleh perusahaan dengan total utang perusahaan. Hal ini bisa dikatakan bahwa modal yang ada di perusahaan didapati dari pihak eksternal seperti para kreditur yang memberikan pinjaman atau utang. Jika nilai *debt to equity* besar, kemungkinan perusahaan memiliki utang yang cukup besar namun tidak cukup untuk membayar utang. Kejadian ini dapat mempengaruhi *financial distress*, karena jika nilai utang yang belum bisa dibayar maka nilai utang tersebut akan semakin membesar karena adanya utang bunga didalamnya. Semakin tinggi nilai utang yang tidak bisa terbayar maka semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan akan mengalami *financial distress*”.

Berdasarkan penelitian Silanno dan Loupatty (2021), hubungan *debt to equity ratio* terhadap *financial distress* yaitu:

“Semakin besar *DER*, mencerminkan solvabilitas semakin rendah sehingga kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya rendah, hal ini menyebabkan risiko *financial distress* terhadap perusahaan semakin besar. Dalam persoalan *total debt to equity ratio* yang perlu dipahami bahwa, tidak ada batasan berapa *total debt to equity ratio* yang aman bagi suatu perusahaan, namun untuk konservatif biasanya *total debt to equity ratio* yang lewat 66% atau 2/3 sudah dianggap berisiko”.

Menurut Sari & Wahyuni (2023), “*leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*”. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviyana et al. (2024), menyatakan bahwa “*debt to Equity Ratio* berpengaruh secara positif terhadap *financial distress*”. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Suhendah (2023) menghasilkan hasil yang berbeda, yaitu “*debt to equity ratio (DER)* berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*,” hasil tersebut sejalan dengan penelitian Hananiyah & Jaya (2023) yang mengungkapkan bahwa “*the variable debt to equity ratio significantly negatively influences financial distress*”. Berdasarkan uraian tersebut, dibentuk hipotesis alternatif ketiga dalam penelitian ini, yaitu:

**Ha<sub>3</sub> : *DER (Debt to Equity Ratio)* memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*.**

## 2.12 Komisaris Independen

Menurut J. Hanafi dan Brelialisti (2016) dalam Alexandra et al. (2022), definisi dari komisaris independen, yaitu:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan yang dapat memberikan pengaruh pada kemampuannya untuk bertindak independen. Fungsi dari komisaris independen di dalam sebuah perusahaan adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi dalam hal mengontrol masalah keuangan perusahaan agar dewan direksi tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan dan terhindar dari kondisi kesulitan keuangan”.

Dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek (2017) Pasal 18 ayat (1), “Penentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan:”

- a. “ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;”
- b. “kondisi Perusahaan Efek;”

- c. “keberagaman pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan”
- d. “efektivitas dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi”.

Definisi komisaris independen menurut Muliasari dan Hidayat (2020) dalam Setyawan dan Aryati (2023) yaitu:

“Mereka yang tak berkolaborasi bersama *stake holder internal* dan eksternal. Kehadiran komite independen pada korporasi berfungsi berperan sebagai mediator antara prinsipal dan agen pada waktu, memastikan bahwa tiada dikecualikan dalam strategi yang berlaku. Dalam hal lain, komite independen juga bertugas dalam menyerahkan kewenangan kepada investor kelompok kecil dengan tujuan pendapatnya direspon”.

Definisi komisaris independen menurut Fahmi (2014) dalam Purnamasari dan Syahputra (2025) beserta peranannya, yaitu:

“Komisaris yang tidak memiliki saham namun ditunjuk untuk menjadi komisaris independen karena faktor kapasitas kepemilikan ilmu dan pengalaman dalam bidang tersebut telah diakui dan mampu memberi masukan kepada pihak dewan komisaris dalam setiap pengambilan keputusan, terutama keputusan-keputusan yang diusulkan oleh pihak manajemen perusahaan”.

Menurut Fabiola dan Murwaningsari (2025), peran dari komisaris independen dalam perusahaan yaitu:

“Dalam hal memperkuat tata kelola, komisaris independen berkontribusi dalam berbagai komite penting seperti komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi dimana objektivitas serta independensi sangat dibutuhkan. Komisaris independen berperan sebagai pihak eksternal perusahaan yang mampu memberikan pandangan luas dan tidak bias dalam pengambilan keputusan strategis”.

Dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek (2017) Pasal 18 ayat (2), dijelaskan bahwa “Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi”. Menurut Liga dan Lukman (2021), rumus yang digunakan untuk mengukur proporsi komisaris independen, yaitu:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \quad (2.14)$$

Keterangan:

$\sum$  Komisaris independen = Jumlah anggota dewan komisaris independen

$\sum$  Anggota dewan komisaris = Jumlah seluruh anggota dewan komisaris

Berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007), pada pasal 1 nomor 6, “dewan komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Oleh sebab itu, posisi Komisaris merupakan salah satu peran yang krusial bagi kelangsungan operasional perusahaan. Pada suatu perusahaan, dewan komisaris memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab kepada Direksi.

Dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Perdagangan Efek (2017) Pasal 21 ayat (1), “Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan Efek pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi”.

Dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Perdagangan Efek (2017) Pasal 21 ayat (2), dijelaskan bahwa:

“Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi”.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya terdapat aturan yang dijelaskan pada ayat (4) yang berbunyi “Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara independen”. Selain itu, “Dewan

Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan” (OJK, 2017).

Saat melaksanakan tugasnya, dewan komisaris memiliki kewajiban yang diatur pada UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007), pada pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen”.

Fungsi audit yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 23 ayat (2), “Fungsi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan atas:”

- a. “informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas;”
- b. “independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;”
- c. “rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan:
- d. “pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek”.

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen”.

Berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007) Pasal 120 ayat (1), “Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan”. Ayat selanjutnya kembali menjelaskan “Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya”.

Untuk menjadi Komisaris Independen, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Perdagangan Efek (2017) pada pasal 22, yaitu “Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:”

- a. “bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya;”
- b. “tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek;”
- c. “tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek; dan”
- d. “tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek”.

Hubungan komisaris independen dengan *financial distress* menurut pendapat Shanti dan Widjaja (2025), yaitu:

“Komisaris independen bertugas melakukan fungsi pengawasan yang objektif terhadap manajemen. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin baik pengawasan terhadap kebijakan keuangan dan strategi perusahaan, sehingga potensi *financial distress* dapat ditekan”.

### **2.13 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Financial distress***

Menurut Palupi (2021) dalam Syam et al. (2024), berdasarkan penelitian yang dilakukan pengaruh komisaris independen terhadap *financial distress* yaitu:

“Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau dewan komisaris lainnya. Mereka memainkan peran penting dalam mekanisme pengawasan pengelolaan perusahaan dengan memantau kinerja melalui kegiatan operasional dan kebijakan yang diambil oleh dewan direksi.

Dengan demikian, jumlah dewan komisaris independen yang lebih banyak dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kesesuaian penyelenggaraan perusahaan oleh direksi melalui pengawasan yang lebih ketat. Dewan komisaris independen dapat melaksanakan tugasnya secara efektif apabila didukung oleh anggota dewan independen yang tidak memiliki hubungan dengan pemilik atau manajer perusahaan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiadi et al. (2024), menunjukkan bahwa pengaruh komisaris independen dengan *financial distress* yaitu:

“*The board of commissioners is tasked with supervising and providing advice to the board of directors and ensuring that the company implements good corporate governance. The independent board of commissioners can be calculated by the number of independent commissioners divided by the number of commissioners. Based on agency theory, it is explained that the more independent commissioners on the board of commissioners, the better the board of commissioners will be in supervising the company. The board of commissioners needs independent commissioners to supervise and control the actions of the board of directors*”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hariyani & Kartika (2021), yang menyatakan bahwa “komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang semakin besar maka perusahaan tersebut mengalami *financial distress* akan semakin kecil”. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Aryati (2023), yang juga menyatakan bahwa “komisaris independen bernilai negatif artinya semakin besar nilai komisaris independen maka semakin rendah potensi *financial distress*”. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Prayitno dan Mahroji (2025) menunjukkan bahwa “*independent commissioners do not have a significant effect on financial distress*”.

#### **2.14 Pengaruh *TATO, CR, DER, dan Komisaris Independen Secara Simultan terhadap Financial distress***

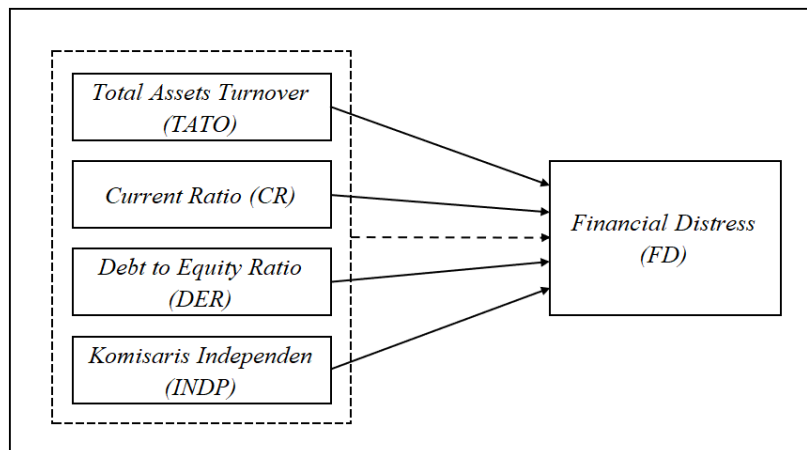
Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai pengaruh *TATO, CR, DER* dan Komisaris Independen terhadap *financial distress*. Hasil penelitian tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Silanno & Loupatty (2021), “secara simultan *current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset* memberikan kontribusi terhadap *financial*

*distress* pada perusahaan-perusahaan di Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih & Safitri (2022) menyatakan bahwa “variabel independen yakni *Net Profit Margin*, *Current Ratio*, *Debt Equity Ratio*, *Cash Flow Ratio*, dan *Firm Size* berpengaruh secara bersamaan terhadap *Financial distress*”. “Secara simultan variabel *ROA*, *DER*, *CR*, dan *TATO* berpengaruh signifikan terhadap variabel *financial distress*” (Dewi et al., 2022). Selain itu, menurut Kosasih dan Widyasari (2025), menyatakan “berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa likuiditas, profitabilitas, *activity ratio* dan leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*”. Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyawan dan Aryati (2023) menjelaskan bahwa Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, *Cash Flow*, Biaya Agensi Manajerial, dan *Firm Size* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel independen *Financial Distress*.

## 2.15 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Model Penelitian